

INDEPENDENSI – INTEGRITAS - PROFESIONALISME



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Tahun 2023 ini dapat kami susun.

BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan salah satu unit Eselon II pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja kepada para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja AKN V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

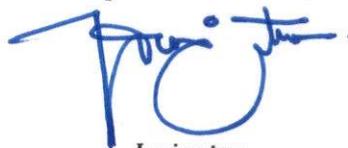
Pada Tahun 2023, dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja yang meliputi kegiatan teknis pemeriksaan dan penunjang pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Riau memperoleh skor sebesar 100,68. Pencapaian skor kinerja ini dikarenakan beberapa IKU yang masih belum terealisasi.

Kami menyadari masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki agar skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau semakin meningkat kedepannya.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 dan menjadi masukan untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

Pekanbaru, 31 Januari 2024

Kepala Perwakilan, ✓



Jariyatna

NIP. 197001311996031003

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	3
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	5
E. Isu-Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	7
B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Lampiran II yang menyatakan bahwa Pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Sehingga, Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

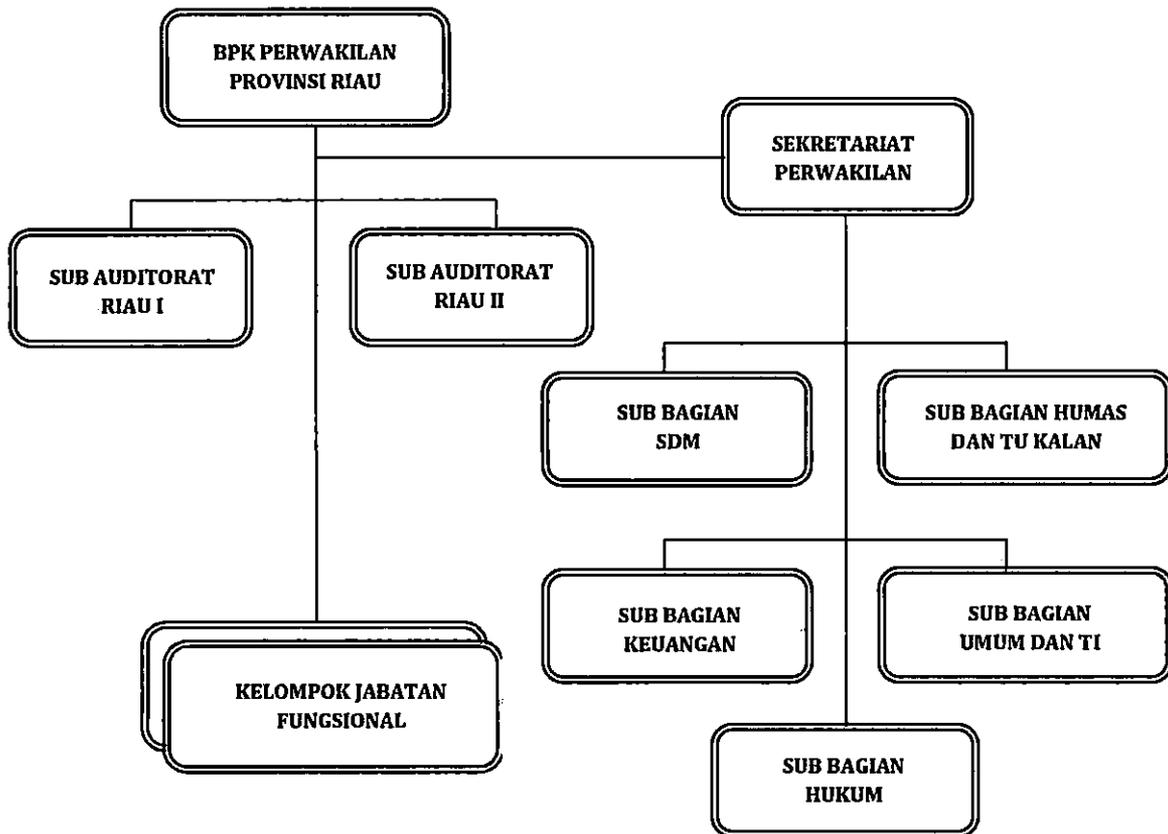
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK di mana tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD, dan lembaga terkait dilingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau



Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Subauditorat Riau I

Subauditorat Riau I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa

BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

2. Subauditorat Riau II

Subauditorat Riau II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan

disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

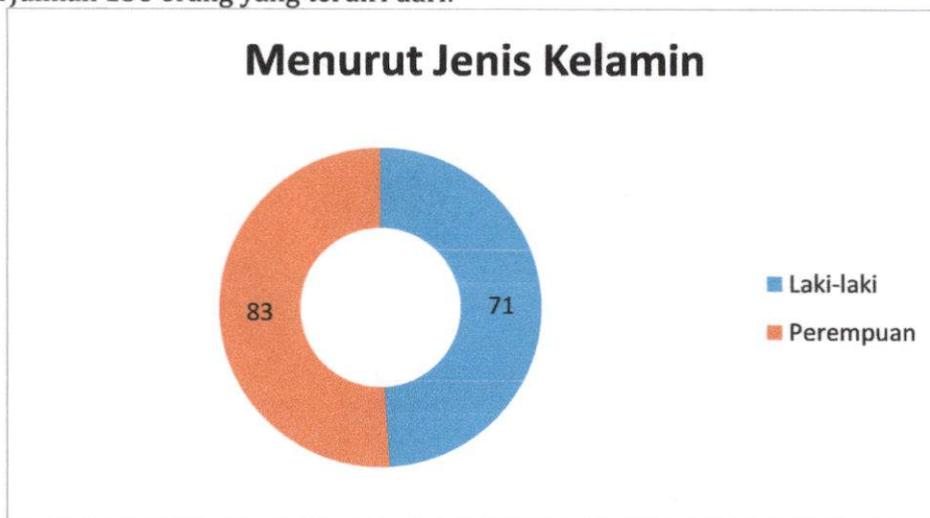
3. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Riau

1. Sumber Daya Manusia

SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Riau per 30 September 2023 berjumlah 156 orang yang terdiri dari:



Menurut Golongan/Pangkat	Jumlah
IV/e (Pembina Utama)	0
IV/d (Pembina Utama Madya)	1
IV/c (Pembina Utama Muda)	1
IV/b (Pembina Tingkat I)	3
IV/a (Pembina)	4
Jumlah	9
III/d (Penata Tingkat I)	31
III/c (Penata)	6
III/b (Penata Muda Tingkat I)	39
III/a (Penata Muda)	62
Jumlah	138
II/d (Pengatur Tingkat I)	2
II/c (Pengatur)	5

II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	0
II/a (Pengatur Muda)	0
Jumlah	7
I/d	0
I/c	0
I/b	0
I/a	0
Jumlah	0
Jumlah Total	156

Menurut Jenjang Pendidikan	Jumlah
S3	0
S2	33
S1/D4	113
Sarjana Muda/D3	6
D1	0
SLTA/SMK	2
SLTP	0
SD	0
Jumlah Total	154

E. Isu-Isu Strategis

Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau sudah baik, sehingga seluruh entitas sudah mendapat opini WTP atas laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal strategis yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah daerah, seperti pengelolaan dan pencatatan aset serta pengelolaan belanja modal.

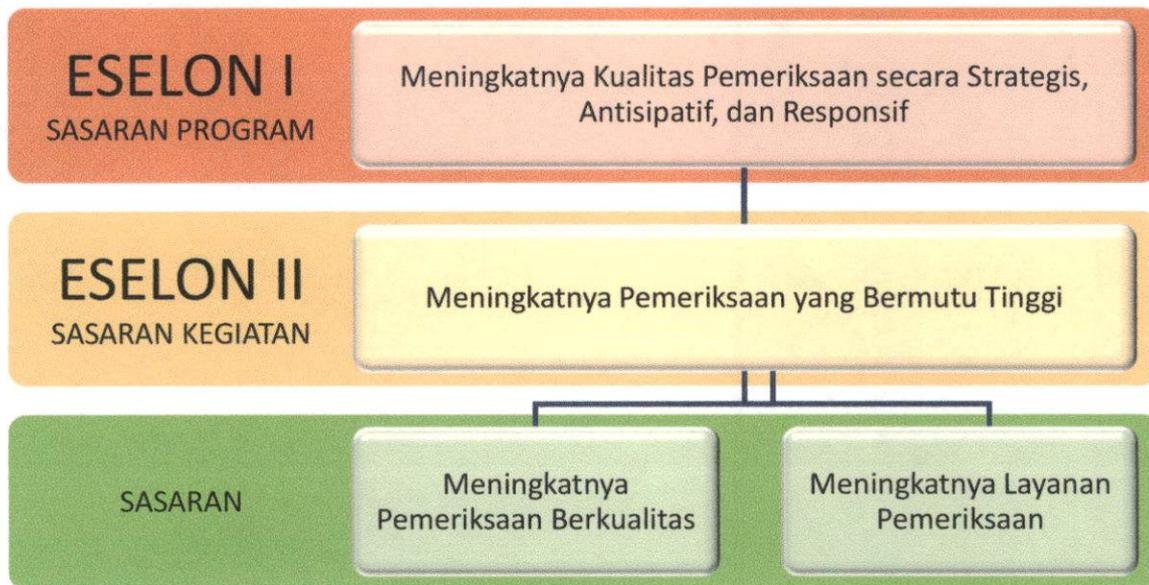
Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Riau senantiasa terbuka menerima kunjungan dari berbagai pihak seperti pers, LSM, mahasiswa, pelajar sekolah, maupun instansi pemerintah lainnya diluar entitas pemeriksaan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Riau terbuka untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi publik dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPK perwakilan Provinsi Riau juga telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Adapun terkait peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan, secara bertahap akan dipenuhi sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

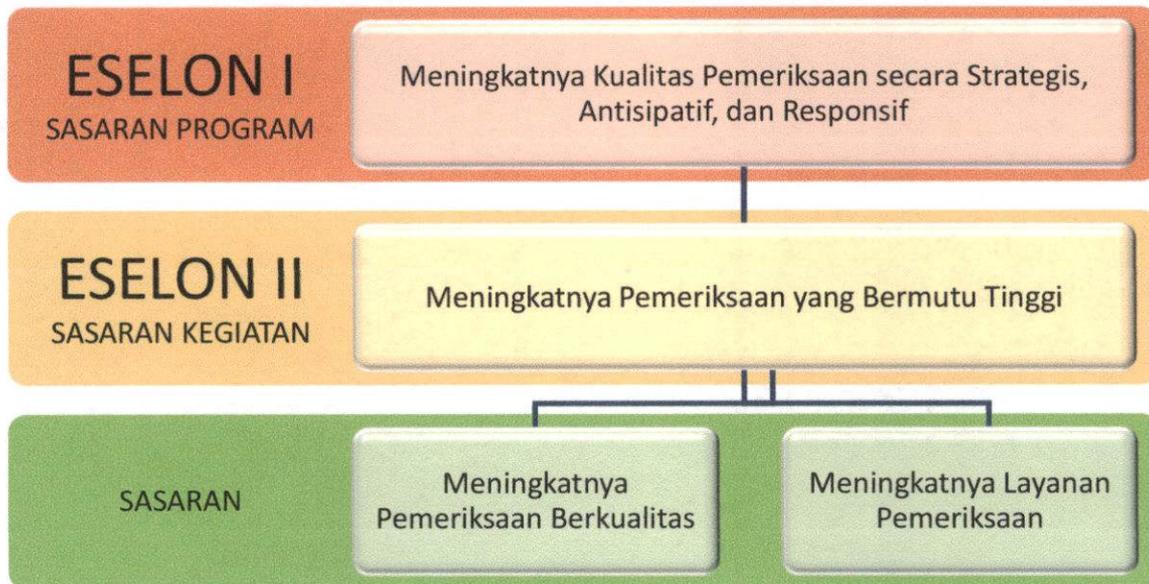
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V sebagai pelaksana sebagian tugas dan wewenang BPK di bidang pemeriksaan, telah menetapkan Sasaran Program Eselon I yang digambarkan dalam bentuk peta strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1 - Peta Strategi AKN V

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program AKN V dapat digambarkan dalam peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai berikut:



Gambar 2.2 - Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau selaku pimpinan satuan kerja dan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V selaku atasan pimpinan satuan kerja. Strategi, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 - Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

II. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Nota Dinas Kalan Nomor 97/ND/XVIII.PEK/04/2023 tanggal 03 April 2023 telah menyampaikan dokumen rencana aksi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana aksi dibuat untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja. Rencana aksi atas target dibuat pertriwulan sesuai dengan permintaan laporan kinerja triwulan.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada setiap indikator kinerja secara umum diantaranya:

- a. Meningkatkan QC dan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas hasil evaluasi LHP;
- c. Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan tematik nasional pemeriksaan yang ditetapkan BPK;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas BPK Perwakilan Tahun 2023;
- e. Melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil evaluasi AKIP

Hasil reviu AKIP Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound (SMART) dan cukup, serta menggunakan penjenjangan kinerja hingga ke level individu dengan logis. Perencanaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil organisasi yang berkesinambungan dan selalu dilakukan evaluasi. Perencanaan penganggaran BPK Perwakilan Provinsi Riau telah mendukung kinerja dimana proses penyusunan, penelitian, dan reviu-nya telah menggunakan aplikasi Proses RKA.

b. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memanfaatkan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan menggunakan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan. Selain itu, terdapat upaya inovatif pada BPK Perwakilan Provinsi Riau yang layak menjadi percontohan antara lain Aplikasi Amanah (Aplikasi Pelayanan Penerimaan Tamu Berbasis Web - Google Form dan Google Spreadsheet. Upaya inovatif telah ditetapkan dengan Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) Nomor 46/ND/XII.1/1/2022 tanggal 19 Januari 2022.

c. Pelaporan Kinerja

LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 serta Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 38/ND/XII.1/01/2023, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi sebagai berikut:

- 1) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 2) kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 3) efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan);
- 4) upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Namun demikian, evaluasi dalam LAKIN telah dimanfaatkan untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

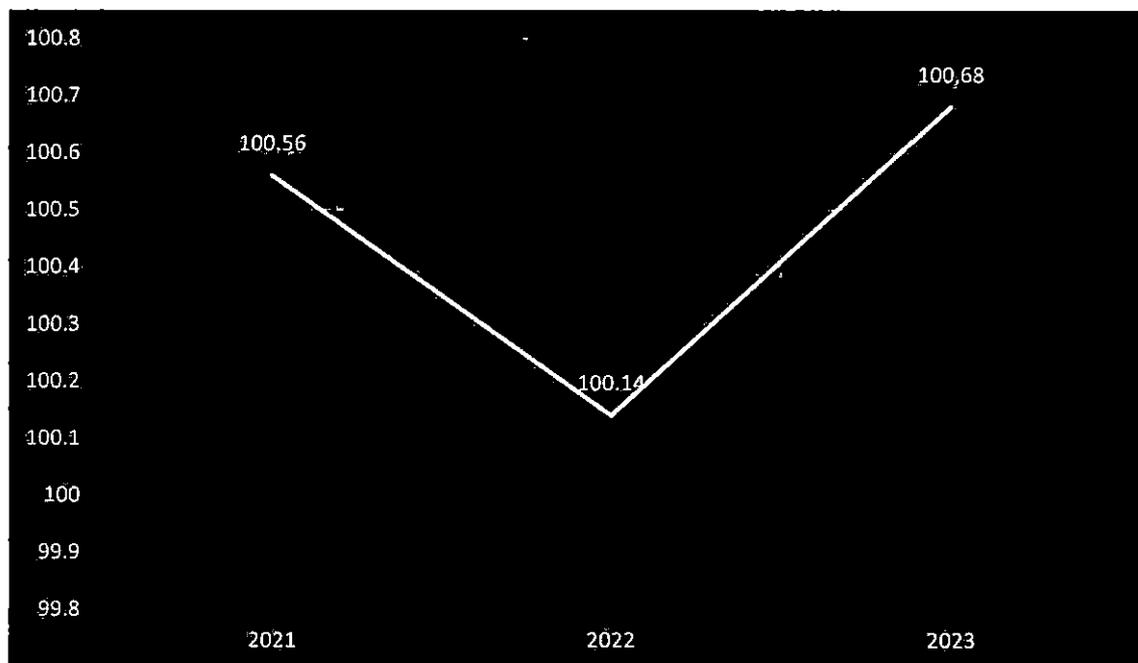
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPK Perwakilan Provinsi Riau telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai yang setiap tahun mengikuti kegiatan Forum Pengelola Renstra dalam rangka mengevaluasi indikator dan target kinerja serta mengikuti sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Upaya perbaikan sebagai berikut.

- a. Berkoordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan cascading kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2023 dengan menambahkan informasi:
 - 1) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - 2) kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - 3) efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan);
 - 4) upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang mendukung pengukuran capaian kinerja BPK. Pada Tahun 2023, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau sebesar 100,68. Skor tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100,14. Skor capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Tren Kinerja Selama 3 Tahun

BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Tahun 2023 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,68. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Triwulan III Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Skor
Score Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2023				
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi				
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,77%	90,77
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,83%	105,00
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	102,25%	102,25
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	101,00%	101,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,24%	100,24
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,80	96,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	88,00	98,88
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	97,43%	99,42
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110%	105,00
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,07	105,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,69%	98,04

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Triwulan III Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Skor
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	90,40%	102,15

Adapun perbandingan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau realisasi tahun 2023 dengan realisasi selama tiga tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Selama Tiga Tahun

Uraian Indikator Kinerja Utama		2023		2022		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,77%	100%	89,29%	100%	95%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,83%	75%	82,48%	75%	80,51%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	102,25%	100%	100%	100%	100,92%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan	100%	101%	100%	100%	100%	100%

Uraian Indikator Kinerja Utama		2023		2022		2021	
Skor Tahunan		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan						
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,24%	100%	100%	100%	100,40%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,80	5,00	4,86	5,00	4,51
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00 (A)	88,00	88,00	90,44	87,00	86,90
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	97,43%	97%	95,25%	96%	99,14%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110%	100%	100%	100%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,07	3,80	4,12	3,80	3,99
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,69%	100%	100%	100%	100%
IKU13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	90,40%	88%	89,60%	87,5%	90,76%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahunan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	100%	100%	100%	100%	100%	90,77%	90,77
IKU 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
IKU 3	75%	75%	75%	75%	75%	79,83%	105,00
IKU 4	100%	100%	100%	100%	100%	102,25%	102,25
IKU 5	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101,00
IKU 6	100%	100%	100%	100%	100%	100,24%	100,24
IKU 7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	96,00
IKU 8	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	88,00	98,88
IKU 9	95%	96%	97%	98%	98%	97,43%	99,42
IKU 10	100%	100%	100%	100%	100%	110%	105,00
IKU 11	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,07	105,00
IKU 12	100%	100%	100%	100%	100%	98,69%	98,69
IKU 13	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	90,40%	102,15

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Capaian tersebut diukur berdasarkan dokumen pendukung berupa QA dan QC yang telah diperoleh dan telah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Kepala Sub Auditorat serta Kepala Perwakilan. Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. Berikut Perbandingan capaian IKU 1 tahun 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1 Tahun Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78,85%	95%	89,29%	90,77%	
Capaian	78,85	95	89,29	90,77	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	78,85%	95%	89,29%	90,77%	

Realisasi IKU 1 tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan tahun 2023 adalah sebesar 90,77% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU 1 masih lebih rendah dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 90,00. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh belum optimalnya tingkat konsistensi atas LHP yang diterbitkan pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dari hasil evaluasi EPP. LHP yang diterbitkan pada BPK Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2023 sebanyak 27 LHP. Upaya untuk mendorong capaian IKU 1 agar sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan pengujian kualitas berupa konsistensi kalimat LHP oleh masing-masing tim pemeriksa.

Penyerapan anggaran terkait IKU 1 terhubung pada pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau hingga menjadi output sebanyak 27 LHP yakni terealisasi sebesar Rp7.937.872.898,00 atau 100% dari pagu anggaran.

2. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berikut Perbandingan capaian IKU 2 tahun 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 Tahun Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100%	100%	100%	100%	

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU 2 telah sesuai target yang ditetapkan. Realisasi IKU 2 juga tidak mengalami penurunan/kenaikan selama 3 tahun terakhir. Ketercapaian realisasi IKU 2 didukung dengan peningkatan, pengecekan, pengawasan, dan perbaikan pada P2 baik dari tahap Ketua Tim Pemeriksa hingga Kepala Perwakilan sebelum pemeriksaan dilaksanakan agar kesesuaian harapan penugasan, tujuan pemeriksaan dan simpulan dapat sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi BPK. Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 2 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Rapat koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024 dengan memperhatikan Renstra BPK dan kebijakan AKN V;
- b. Pemberi Tugas Pemeriksaan menyatakan secara tertulis dan jelas Harapan Penugasan pemeriksaan yang dituangkan pada P2;
- c. Pengendali Teknis meningkatkan reviu kesesuaian Program Pemeriksaan dengan Harapan Penugasan.

3. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Berikut perbandingan capaian IKU 3 Tahun 2023 selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	79,41%	80,51%	82,48%	79,83%	

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	105	105	105	105,00	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	105,88%	107,34%	109,97%	104,94%	

Ketercapaian realisasi IKU 3 didukung dengan meningkatkan pemantauan pelaksanaan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas melalui aplikasi SIPTL dan mendorong pemerintah daerah dengan meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten. Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 3 agar melampaui target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Mengidentifikasi kesulitan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya;
- b. Inventarisasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti dan melakukan analisis.

Realisasi IKU 3 telah mencapai sebesar 79,83% dari target sebesar 75,00%. Penyerapan anggaran terkait IKU 3 tidak terlepas dari anggaran komponen melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga terealisasi sebesar Rp390.958.342,00 atau 100% dari pagu anggaran.

4. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,61%	100,92%	100%	102,25%	
Capaian	100,61	100,92	100	102,25	
Persentase Realisasi Terhadap target 2024	100,61%	100,92%	100%	102,25%	

Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 102,25% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 4 telah melewati target yang ditetapkan. Realisasi IKU 4 tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 102,25% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Ketercapaian realisasi IKU 4 didukung dengan mengikuti rapat koordinasi pemeriksaan tematik nasional dan memastikan ketersediaan anggaran dan personil di perwakilan serta menyusun tim pemeriksaan tematik nasional. Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 4 atas target yang telah ditetapkan yaitu mengikuti rapat koordinasi perkembangan pemeriksaan tematik nasional.

Penyerapan anggaran terkait IKU 4 terhubung pada pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau hingga menjadi output sebanyak 27 LHP yakni terealisasi sebesar Rp7.937.872.898,00 atau 100% dari pagu anggaran.

5. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	101%	
Capaian	100	100	100	101	

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100%	100%	100%	101%	

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan sebesar 101% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 5 telah melampaui target yang ditetapkan. Ketercapaian realisasi IKU 5 didukung dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 5 atas target yang telah ditetapkan yaitu dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus berusaha agar terus berkontribusi dalam permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

6. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3.9 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,40%	100%	100,24%	
Capaian	100	100,40	100	100,24	
Persentase Realisasi Terhadap target 2024	100%	100,40%	100%	100,24%	

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar 100,24% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 6 telah melebihi target yang ditetapkan. Ketercapaian realisasi IKU 6 didukung dengan mengikuti rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) pemeriksaan tematik lokal dan memastikan ketersediaan anggaran di perwakilan serta menyusun tim pemeriksaan tematik lokal. Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 6 atas target yang telah ditetapkan yaitu mengikuti rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) perkembangan pemeriksaan tematik lokal.

Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus berusaha agar terus mampu untuk melaksanakan pemeriksaan tematik lokal dalam menghadapi isu-isu strategis.

Penyerapan anggaran terkait IKU 6 yakni terealisasi sebesar Rp7.937.872.898,00 atau 100% dari pagu anggaran.

7. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Tabel 3.10 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,36	4,51	4,86	4,80	
Capaian	87,20	90,20	97,20	96,00	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	87,20%	90,20%	97,20%	96,00%	

Realisasi IKU 7 Tingkat Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK tahun 2023 adalah sebesar 4,80 dari target sebesar 5,00, sehingga capaian IKU 7 masih lebih rendah dari target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh belum optimalnya

sosialisasi implementasi nilai dasar dan program-program BPK Perwakilan Provinsi Riau ke seluruh pegawai. Upaya untuk mendorong capaian IKU 7 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan nilai-nilai dasar pada setiap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau. Peningkatan dilakukan dengan cara sosialisasi oleh kepala perwakilan kepada seluruh pemeriksa pada saat kegiatan pembekalan sebelum tim berangkat ke lapangan terkait visi misi dan nilai dasar BPK, budaya kerja, dan kode etik serta gratifikasi.

Realisasi IKU 7 telah mencapai sebesar 4,80 dari target sebesar 5,00. Dengan menerapkan langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat mencapai target IKU 7 sebesar 5,00 seluruhnya hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga diharapkan dapat terus mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK ke seluruh pegawai.

8. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel 3.11 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
Realisasi	87,43	86,90	90,44	88,00	
Capaian	101,66	99,89	102,77	98,88	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	98,23%	97,64	101,61	98,87	

Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 telah mencapai sebesar 88,00 (A) dari target sebesar 89,00 (A), sehingga capaian IKU 8 tidak mencapai target yang

ditetapkan. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022 belum sepenuhnya menyajikan informasi sebagai berikut:

- a. perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b. kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- c. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan);
- d. upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Upaya untuk meningkatkan capaian IKU 8 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2023 dengan menambahkan informasi:

- a. perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b. kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- c. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan); dan
- d. upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

9. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 3.12 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 9 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	98%
Realisasi	99,14%	99,14%	95,25%	97,43%	
Capaian	104,36	103,27	98,20	99,42	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	101,36%	101,36%	97,19%	99,42%	

Pada Tahun 2023, 97,93% pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau memanfaatkan SISDM, 92,30% pegawai memanfaatkan Jasmin, 95,00% pegawai memanfaatkan SMP, 100,00% pegawai memanfaatkan SiAP dan 100,00% pegawai memanfaatkan SiPTL. Sehingga tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau mencapai 97,43%. Realisasi yang cukup tinggi ini didorong oleh kesadaran para pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang disediakan oleh Biro TI secara optimal.

Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 9 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu seluruh pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan layanan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus proaktif dalam mendorong para pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang tersedia.

10. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Tabel 3.13 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 10 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	110%	
Capaian	100	100	100	105	

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100%	100%	100%	110%	

Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan tahun 2023 adalah sebesar 110,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 10 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2022 sebesar 100%. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya penerapan manajemen pengetahuan pada perwakilan. Pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau mampu melaksanakan 11 aktivitas manajemen pengetahuan. Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 10 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Melaksanakan diklat persiapan pemeriksaan atas LKPD pada tahun 2024;
- b. Melaksanakan *workshop* Pemeriksaan LKPD pada tahun 2024;
- c. Melaksanakan sosialisasi peraturan disiplin pegawai dan implementasi kinerja individu; dan
- d. Melaksanakan kegiatan *Knowledge Transfer Forum* (KTF) internal perwakilan.

Realisasi IKU 10 telah melebihi target sebesar 110,00%. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

11. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Tabel 3.14 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 11 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,66	3,99	4,12	4,07	
Capaian	96,32	105	105	105	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	96,31%	105%	108,42%	105%	

Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan Atas Kualitas Komunikasi tahun 2023 adalah sebesar 4,07 dari target sebesar 3,80, sehingga capaian IKU 11 telah melampaui target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya komunikasi yang terjalin antara BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan *stakeholders* baik masyarakat, IPH, LSM (wartawan) dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya baik secara kunjungan dan program pemeriksaan, Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 11 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan *stakeholders* serta mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan dan non pemeriksaan dengan pihak luar dengan tetap menjaga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalitas.

12. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).

Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Tabel 3.15 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 12 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	95,50%	100%	100%	98,69%	
Capaian	95,50	100	100	98,69	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	95,50%	100%	100%	98,69%	

Pada Tahun 2023, sebanyak 151 dari 153 orang atau sebesar 98,69% pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi jam diklat minimal yang dipersyaratkan.

Realisasi IKU 12 Pemenuhan Pengembangan Kompetensi tahun 2023 adalah sebesar 98,69% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 12 belum sesuai target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena terdapat Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa yang diikuti oleh dua pegawai namun tidak diakui sebagai nilai pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi. Upaya untuk meningkatkan capaian IKU 12 agar sesuai target yang telah ditetapkan adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan PSMK terkait kriteria diklat apa saja yang diakui untuk pemenuhan jam diklat dan pengembangan kompetensi.

13. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- a. Penyerapan anggaran;
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- c. Pencapaian keluaran; dan
- d. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun

2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tabel 3.16 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 13 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88,5%	89%
Realisasi	91,21%	90,76%	89,60%	90,40%	
Capaian	104,84	103,73	101,82	102,15	
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	102,48%	101,97%	100,67%	101,57%	

Pada Triwulan IV Tahun 2023, IKU ini terealisasi sebesar 90,40%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,76%; dan
- b. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 97,36%.

Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tahun 2023 adalah sebesar 90,40% dari target sebesar 88,50%, sehingga capaian IKU 13 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 89,60%. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh:

- 1) Telah dilakukannya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) oleh Kepala Satuan Kerja;
- 2) Langkah-langkah akhir tahun telah disampaikan melalui *Whatsapp Group* Manajemen;
- 3) Melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) dan pemantauan penarikan DIPA setiap Triwulanan;
- 4) Mengikuti forum kinerja pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan setiap tiga bulan sekali

Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 13 agar sesuai target yang telah ditetapkan dengan menyusun data capaian output dan melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung.

Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat dipertahankan dan meningkatkan hingga target tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus melakukan monitoring realisasi anggarannya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

C. Perubahan Budaya Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menetapkan “**Lancang Kuning**” sebagai budaya organisasi yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau. Lancang Kuning memiliki kepanjangan arti: **Andalan, Canggih, Tekun Beribadah dan Berdaya Saing**. Nilai budaya kerja yang berasal dari kearifan budaya lokal. Budaya kerja tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai dasar BPK yang saling berjalan selaras.

1. **AndaLAN**: Selalu siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan penuh rasa tanggungjawab;
2. **CANGgih** adalah senantiasa meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. **TeKUN Beribadah** adalah konsisten menjalankan ibadah sesuai nilai-nilai ajaran agama masing-masing; dan
4. **Berdaya saING** adalah mampu melaksanakan tugas yang berkualitas tinggi sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

D. Analisis Efisiensi

BPK Perwakilan Provinsi Riau selama tahun 2023, telah melakukan berbagai upaya efisiensi dalam pencapaian kinerja agar mendapatkan hasil yang optimal. Berikut kami sampaikan beberapa upaya efisiensi pada capaian kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau, yaitu:

1. Tingkat efisiensi pada IKU 1, berupa:
 - a. Efisiensi atas penyesuaian atas pagu anggaran pada pemeriksaan pada semester 2 dan penyesuaian jumlah pegawai yang mendukung pemeriksaan tersebut;
 - b. Efisiensi dan optimalisasi atas penggunaan aplikasi SiAP dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga monitoring pemeriksaan bisa diketahui secara *real time, up to date* serta *paperless*. Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

2. Tingkat efisiensi pada IKU 2, berupa:

BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengawasan awal terkait monitoring pada kesesuaian pada P2 terkait harapan penugasan dengan proses dan hasil pemeriksaan yang akan bermanfaat pada saat penentuan besaran sampling pemeriksaan.

3. Tingkat efisiensi pada IKU 3 berupa:
 - a. BPK Perwakilan Provinsi Riau pada semester I dan II 2023 menyelenggarakan kegiatan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Upaya tersebut berhasil mendorong *auditee* untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - b. Kepala Perwakilan memberikan dorongan pencapaian target penyelesaian TLRHP pada *entry meeting* dan penyerahan LHP Semester I dan II 2023 kepada para Kepala Daerah;
 - c. Efisiensi atas jumlah hari dan jumlah personil yang ditugaskan dalam pemantauan dari masing-masing Subauditorat;
 - d. Efisiensi atas penggunaan SIPTL dalam pemantauan TLRHP sehingga pemantauan bisa dilakukan secara *realtime*, *uptodate*, dan *paperless*. Perubahan metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*;
 - e. Manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.
4. Tingkat efisiensi pada IKU 4 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan penyesuaian jumlah pemeriksa dan jumlah anggaran yang disediakan untuk mengakomodir kegiatan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyiapkan secara matang perencanaan dalam penyusunan tim untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai P2 dan harapan penugasan, dan sampel pemeriksaan serta disesuaikan dengan kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh pemeriksa sebagai fungsional.
5. Tingkat efisiensi pada IKU 5 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan penyesuaian jumlah pemeriksa dan jumlah anggaran yang disediakan untuk mengakomodir tujuh kegiatan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyiapkan secara matang perencanaan dalam penyusunan tim untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai P2 dan harapan penugasan, dan sampel pemeriksaan serta disesuaikan dengan kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh pemeriksa sebagai fungsional.
6. Tingkat efisiensi pada IKU 6 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan penyesuaian jumlah pemeriksa dan jumlah anggaran yang disediakan untuk mengakomodir kegiatan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyiapkan secara matang perencanaan dalam penyusunan tim untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai P2 dan harapan penugasan, dan sampel pemeriksaan

serta disesuaikan dengan kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh pemeriksa sebagai fungsional.

7. Tingkat efisiensi pada IKU 7 adalah adanya perubahan pelaksanaan dengan metode survei online antara internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain diharapkan penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*. Survei online tersebut disebarkan kepada pegawai. Penyerapan anggaran atas kegiatan ini hampir tidak ada dikarenakan survei online yang telah dilaksanakan.
8. Tingkat efisiensi pada IKU 8 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau meningkatkan indikator-indikator yang tidak tercapai tahun lalu dan mempertahankan indikator kinerja yang telah tercapai. Transparansi pekerjaan telah dilaksanakan dalam mendukung renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau dan output yang telah dirancang/direncanakan pada KAK Perwakilan baik dalam RKP dan RKSP direalisasikan 100% sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan ke PSMK dan Tortama. Proses kegiatan IKU 8 telah dilakukan secara efisien dikarenakan pelaksanaan seperti FGD dilakukan secara daring (aplikasi zoom) yang mempermudah perwakilan dalam melakukan koordinasi.
9. Tingkat efisiensi pada IKU 9 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan sebagian besar tugas dan fungsi dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah dalam hal pengerjaan dan koordinasi. Beberapa efisiensi tersebut terlihat pada sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemeriksaan, pemanfaatan SIAP telah 100% dikarenakan setiap pemeriksaan pada Perwakilan Provinsi Riau telah didorong dengan penggunaan Aplikasi SIAP dan SIPTL untuk setiap kegiatan administrasi setelah pemeriksaan seperti koding temuan, IHPS, TLRHP, juga untuk pemantauan kerugian daerah;
 - b. Dalam hal non pemeriksaan, pemanfaatan portal juga dilaksanakan untuk mengupload kegiatan administrasi kegiatan perwakilan, pemanfaatan SISDM yang menunjang profil SDM individu, dan pemanfaatan email BPK yang terkoneksi dengan jasmin juga telah dilaksanakan.
10. Tingkat efisiensi pada IKU 10 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan, sebagai berikut:
 - a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pasca aktivitas kegiatan *best practice* (BP) penyusunan Instruksi Kerja (IK) Tata Cara Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Di Lingkungan Bpk Perwakilan Provinsi Riau yang telah disusun dengan tanpa biaya;
 - b. Pelaksanaan Diklat LKPD secara daring dan mempertimbangkan pemeriksa dan penunjang yang masih mampu melakukan pemeriksaan sehingga efisiensi dilakukan dengan mengakomodir peserta diklat dengan kebutuhan dalam penyusunan tim pemeriksaan;
 - c. Mentoring JFP Ahli Muda, Ahli Pertama dan CPNS juga dilaksanakan dengan melakukan efisiensi kegiatan mentoring dengan coach dan hasil output mentoring yang akan membantu kegiatan pada perwakilan;
 - d. Studi Lapangan SMKN 1 Enam Lingkung Prov. Sumatera Barat Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL).

11. Tingkat efisiensi pada IKU 11 adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan Ikut dalam pelaksanaan survei kepuasan antara BPK dengan pihak eksternal secara online. Penggunaan survei online tersebut dapat memangkas waktu, biaya dan lebih tepat sasaran.
12. Tingkat efisiensi pada IKU 12 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah melaksanakan diklat secara mandiri dan daring yang telah disetujui oleh Badan Diklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara daring antara lain penghematan anggaran atas perjalanan dinas dan belanja barang.
13. Tingkat efisiensi pada IKU 13 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi SAKTI dari pembuatan SPP hingga SP2D serta realisasi yang telah terjadi (dengan mengupload dokumen) dan aplikasi Prisma untuk pencatatan output dan realisasi pada perwakilan. Penggunaan aplikasi tersebut selain mempermudah pelaporan secara BPK perwakilan dan BPK keseluruhan, juga sebagai efisiensi proses kerja dalam hal *paperless* dan waktu.

E. Realisasi Anggaran

BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2023 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan sebesar Rp28.026.679.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.982.035.417,00 atau 99,84% setelah adanya pengembalian. Penjelasan atas realisasi anggaran per indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja 2023

No	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
A	Pemeriksaan Keuangan Negara Dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	27.982.035.417,00		Keseluruhan pelaksanaan Kinerja Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	284.218.708,00	24	
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9.786.004.519,00	1	
3	Layanan Perkantoran Bidang Tata Usaha	619.398.668,00	126	
4	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000,00	3	IKU 11
5	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	227.151.269,00	9	

No	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
6	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	230.726.000,00	110	
7	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	3.043.590.762,00	2	
8	Layanan Dukungan Sekretariat Perwakilan	262.141.071,00	3840	
9	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	439.333.045,00	84	
10	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	103.311.500,00	132	
11	Bahan Rumusan Pendapat Perwakilan	220.000,00	1	
12	Sumbangan IHPS	27.999.257,00	2	
13	Laporan Profil Entitas	1.045.000,00	13	
14	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	390.958.342,00	26	IKU 3
15	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	440.038.000,00	26	
16	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	434.603.199,00	12	
17	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.422.400.769,00	20	IKU 10 dan IKU 12
18	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	7.937.872.898,00	27	IKU 1, IKU 2, IKU 4 dan IKU 6
19	LHP Interim BPK Perwakilan Provinsi Riau	2.335.988.880,00	27	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengalami peningkatan dalam pencapaian skor kinerja, yaitu 100,14 pada Tahun 2022 naik menjadi 100,68 pada Tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa target IKU yang sudah tercapai pada Tahun 2023 ini.

Pada periode pengukuran kinerja Tahun 2023, diharapkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat semakin ditingkatkan melalui pengelolaan jadwal yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemeriksaan maupun di bidang kesekretariatan. Sehingga output kinerja yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan optimal, efektif, tepat waktu dan efisien.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan pemanfaatan anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.